



PELANGI PENDIDIKAN

Tinjauan dari Berbagai Perspektif

Penyunting:

A.M. Slamet Soewandi

B. Widharyanto

Barli Bram

Y.F Setya Tri Nugraha

PELANGI PENDIDIKAN

Tinjauan dari Berbagai Perspektif

Penyunting:

A.M. Slamet Soewandi

B. Widharyanto

Barli Bram

Y.F. Setya Tri Nugraha

Penerbitan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2005

Pelangi Pendidikan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif

© USD 2005

Penerbitan Universitas Sanata Dharma

Jl. Gejayan, Mrican, Yogyakarta 55281

Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Ext. 527

Fax. (027) 562383

Email: lemlit@staff.usd.ac.id

Cetakan Pertama

Katalog dalam Terbitan:

Pelangi pendidikan: tinjauan dari berbagai perspektif / disunting oleh A.M. Slamet Soewandi, B. Widharyanto, Barli Bram, Y.F. Setya Tri Nugraha. – Cet.1. – Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2005

x, 226 hlm. ; 15 x 21 cm

ISBN 979-8927-85-0

1. Pendidikan. I. Soewandi, A.M. Slamet. II. Widharyanto, B. III. Bram, Barli. IV. Nugraha, Y.F. Setya Tri

370

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

BUKU INI diberi judul *Pelangi Pendidikan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif*. Karangan-karangan yang ada di dalamnya (berjumlah tiga belas buah) diambil dari jurnal ilmiah kependidikan *Widya Dharma* sejak terbitnya pada bulan Oktober 1990, dan dimaksudkan sebagai sumbangsih FKIP (fakultas tertua dan terbesar) kepada Universitas Sanata Dharma, yang pada tahun ini merayakan pesta emasnya. Buku ini secara tidak langsung juga merupakan refleksi pergulatan pemikiran hari demi hari tentang pendidikan dari sebuah fakultas yang sejak berdirinya memiliki satu-satunya misi, yakni menghasilkan guru profesional, yang bersemangat magis, yang dihasilkan oleh perpaduan antara semangat unggul dalam aspek akademik dan berjiwa humanistik dalam kekaryanya.

Jika setiap karangan di dalam buku ini diumpamakan sehelai selendang, maka ketiga belas karangan ini merupakan untaian selendang yang berwarna-warni, yang membentuk sebuah spektrum warna menyerupai pelangi dalam bianglala pendidikan di Indonesia. Setiap selendang menggambarkan pendidikan dari sudut pandang atau perspektif tertentu.

Sebagai mana layaknya karangan yang diambil dari jurnal yang bertahun-tahun terbit (15 tahun yang lalu jurnal itu sudah terbit), ikatan tematisnya tidak begitu erat. Meskipun demikian, benang-benang merah perekatnya toh masih dapat ditelusuri.

Dr. J. Sudarminta, S.J. melalui karangannya “Pandangan Alfred N. Whitehead tentang Pendidikan” memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan, melalui empat gagasan pokok filsuf Alfred N. Whitehead berikut: (1) perlunya kegiatan pendidikan didasarkan atas suatu visi dan pendekatan holistik terhadap kenyataan sehingga berkembangnya spesialisasi ilmu yang semakin dituntut demi profesionalisme tidak membuat orang jatuh ke penyempitan wawasan karena pendekatan yang terlalu sektoral; (2) perlunya peserta didik diberi ruang kebebasan untuk mengembangkan minat, bakat, inisiatif dan imjinasi kreatif kalau pendidikan mau menghasilkan manusia-manusia yang mandiri; untuk itu aktivitas-diri peserta didik merupakan hal yang sentral dalam pendidikan; (3) perlunya pendidikan disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak dan ritme belajarnya, dan (4) perlunya kesadaran bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berguna.

Dr. C. B. Mulyatno, Pr. melalui karangannya “Pendidikan yang Bervisi Sosial: Kajian Teoretis atas Pemikiran John Dewey”, mengingatkan kita bahwa soal pendidikan tidak cukup hanya memikirkan soal bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk mencari pekerjaan dan menjadi warga negara yang baik. Soal pendidikan juga tidak cukup hanya berkuat pada kurikulum dan metode pengajaran, melainkan harus sampai pada visi mengenai manusia sebagai subjek pendidikan. Dan karena yang menjadi subjek pendidikan adalah pribadi yang hidup dalam sejarah dan konteks sosial tertentu, proses pendidikan tidak bisa mengabaikan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala persoalannya. Dengan demikian, pendidikan seharusnya menjadi proses rekonstruksi pengalaman konkret manusia.

Prof. Dr. Tom Jacobs, S.J. dalam karangannya “Masalah Kebebasan: Inspirasi dari Teilhard untuk Pendidikan”, juga mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan kedewasaan, dan itu berarti kebebasan, tetapi bukan kebebasan yang mengarah pada individualisme dan ingin memutlakkan kemerdekaannya. Melalui visi Teilhard kita diingatkan bahwa hidup manusia terjalin dengan dunia sekitarnya. Karena itu, kebebasan manusia tidak pernah dilihat secara utuh dan penuh kalau sosialitas tidak dilihat dan diakui sebagai unsur hakikinya.

Dr. A. Sudiarja, S.J. melalui karangannya “Pendidikan Yesuit untuk Zaman Sekarang”, ingin menawarkan bahwa “Pendidikan Yesuit” yang semula dimaksudkan sebagai pendidikan calon yesuit, dan berorientasi “humanis religius” dapat dipakai sebagai salah satu pendekatan dalam pendidikan yang berlaku umum, bahkan bukan hanya pendidikan untuk umat Katolik. Pendekatan yang ditawarkan dari “Pendidikan Yesuit” meliputi lima dinamika berikut: (1) membuka hati, (2) mengalami atau “mencecap secara mendalam” apa yang diperolehnya di kelas, (3) merefleksi untuk menangkap arti dan nilai apa yang dipelajari, (4) ber”aksi” sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi nyata dalam tindakan, dan (5) mengevaluasi sehingga diketahui kemajuan yang terjadi pada dirinya, baik akademis maupun kepribadiannya. Dr. C. Putranta, S.J., dalam karangannya “Sumbangan Agama dalam Proses Reformasi di Indonesia: Mencari Kerangka Pemahaman Teoretis dalam Perspektif Kristiani”, mengingatkan bahwa agama dapat berperan sebagai perekat persatuan, setidak-tidaknya bagi para umatnya. Akan tetapi, di sisi lain agama juga mengandung unsur-unsur disintegratif apalagi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Atas nama agama kelompok-kelompok masyarakat dapat saling memusuhi. Karena reformasi sejati menyangkut perubahan sikap bernegara dan bermasyarakat ke arah sikap yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok dan pribadi, maka agama dapat berperan dalam pembaharuan sikap itu. Sebagai pendekatan dalam rangka perubahan sosial, kerangka teoretis tentang peranan agama dapat dilihat dari empat perspektif berikut: (1) perspektif modernisasi, (2) perspektif sistem global, (3) perspektif kontingensi struktural, dan (4) perspektif kolonisasi kawasan kehidupan.

Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF melalui karangan “Pendidikan Moral di Perguruan Tinggi” memberikan lampu kuning sebuah kenyataan akan munculnya gejala kemerosotan moral dalam masyarakat di tanah air kita. Itulah sebabnya perguruan tinggi harus mengambil inisiatif merancang program pendidikan nilai moral bagi para mahasiswa yang menuntut ilmu di lembaganya. Tiga hal harus ditekankan dalam pendidikan nilai moral itu: (1) pemurnian intensi batiniah, (2) pemberdayaan hati nurani, dan (3) pembelajaran norma-norma moral.

“Tanpa kehendak baik, tindakan baik itu bukanlah moralitas, melainkan kemunafikan”, demikianlah yang dimaksud pemurnian intensi batiniah.

Dr. Paul Suparno, S.J., M.S.T. dalam karangannya “Filosofi Pendidikan Budi Pekerti”, menguatkan pengamatan bahwa “pendidikan sekarang ini masih terlalu menekankan segi pengetahuan dan kurang menekankan segi sikap dan moral sehingga banyak tingkah laku siswa kurang menunjukkan sebagai manusia yang berbudi luhur”. Itulah sebabnya pendidikan budi pekerti menjadi penting karena dengannya proses pendidikan orang muda menjadi lengkap: terjadilah proses hominisasi dan humanisasi. Tiga hal dalam pendidikan budi pekerti perlu ditekankan, yaitu (1) peningkatan penghargaan terhadap nilai manusia, (2) keselarasan dengan alam, dan (3) peningkatan relasi baik dengan Sang Pencipta.

Jika pada karangannya di atas, Dr. Paul Suparno, S.J., M.S.T. membenarkan pengamatan adanya kemerosotan tingkah laku siswa, maka pada karangannya “Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pendidikan Hak Asasi Manusia”, mengingatkan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi manusia (HAM), dan dapat menuntut dipenuhinya hak tersebut. Salah satu yang harus dituntut adalah hak atas pendidikan. Akan tetapi, yang terjadi adalah bahwa banyak anak umur sekolah (di Indonesia) masih tidak dapat menikmati pendidikan dasar mereka.

Dr. Friez R. Tambunan, Pr. melihat segi lain dari pendidikan. Ia berpendapat bahwa desentralisasi dalam pendidikan bukanlah hal yang baru karena memang desentralisasi adalah substansi dari setiap pembaharuan pendidikan di mana saja. Melalui karangannya “Desentralisasi dan Penerapan Manajemen Kualitas Total dalam Pendidikan”, ia mencoba menguraikannya dari sudut manajemen kualitas total (*total quality management*) yang pada dasarnya berintikan dua hal: (1) pelimpahan kewenangan dari pusat ke otoritas yang lebih rendah, dan (2) peningkatan sumber daya manusia pada level *shoop-floor worker* atau tenaga kerja yang terlibat langsung dalam aktivitas kerja.

Drs. Dwi Suhartanto, M.C.M melalui karangannya “Orientasi Pasar di Sektor Pendidikan: Sebuah Kajian Teoretis” juga melihat pendidikan dari perspektif lain. Ia menelaah pustaka tentang orientasi pasar di sektor

pendidikan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efek penerapan orientasi pasar di sektor pendidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan orientasi tersebut. Ditemukan hasil bahwa kebijakan lembaga pendidikan terhadap sarana/prasarana yang mereka miliki, pelayanan akademik maupun non-akademik, dan besarnya biaya pendidikan akan menentukan tingkat orientasi pasar yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Ditemukan juga bahwa ketiga faktor indikator dari orientasi pasar itu berhubungan secara positif dengan kesetiaan pelanggan (mahasiswa/alumni).

Melalui karangannya “Sistem Pendidikan Indonesia Saat Ini dalam Perspektif Psikologis”, Dr. A. Supratiknya menunjuk adanya persoalan kritis pada tiga komponen utama pendidikan: (1) tujuan, (2) pembelajaran, dan (3) evaluasi. Dilihatnya bahwa baik dari isi maupun cara merumuskannya, tujuan pendidikan hampir pada semua jenjang cenderung bersifat konvensional, umum, elementer, kurang menunjuk pada aktivitas dan tidak kontekstual. Pada komponen pembelajaran, ia melihat bahwa kurikulum pada semua jenjang cenderung disusun dengan berbasis isi, bukan kompetensi atau kinerja; begitu pula pada komponen evaluasi: cenderung terpusat pada evaluasi sumatif untuk keperluan menentukan nilai akhir dengan acuan norma.

Kenyataan-kenyataan muram yang terungkap melalui beberapa karangan di atas, membuat kita perlu berintrospeksi apa yang harus kita lakukan. Ada satu hal yang kurang juga kita sadari yaitu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang begitu cepat membuat kita terhenyak. Ternyata IPTEK membawa dampak yang sangat signifikan bagi pendidikan di Indonesia. Dr. J. Sudarminta, S.J. melalui karangannya “Beberapa Implikasi Perkembangan IPTEK Dewasa Ini bagi Pendidikan di Indonesia” menyadarkan kita betapa pentingnya mutu pendidikan ditingkatkan terus-menerus baik dalam pembaharuan isi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diajarkan, maupun cara pengajarannya seturut dengan perkembangan IPTEK tersebut.

Karangan Dr. St. Suwarsono yang berjudul “Tantangan-tantangan terhadap Profesi Keguruan dan Implikasinya bagi Pendidikan Calon Guru” kita tempatkan pada urutan terakhir bukan karena tidak

pentingnya pendidikan calon guru di Indonesia. Penempatan ini semata-mata karena tuntutan “tematis” bunga rampai ini. Semua hal tentang praksis pendidikan, tidak mungkin terjadi tanpa “kehadiran” seorang guru. Bahwa karena perubahan paradigma pembelajaran menuntut hadirnya guru semata-mata sebagai fasilitator, itu pun tidak mengurangi peranan guru sebagai manajer pembelajaran sekaligus juga sebagai agen formasi dalam penanaman nilai-nilai melalui pembelajaran dan tindakannya sebagai pribadi.

Menurut Dr. St. Suwarsono —yang kita setuju juga— kenyataan tentang profesi guru ternyata tidak dihargai: kurang adanya *public trust*, yang berakibat rendahnya penghargaan finansial dan rasa hormat masyarakat. “*Teaching in our nation’s school is a profession, but it is an undervalued and underpaid profession*”, demikianlah dikutip dari Margrath (1987: 4). Kenyataan ini pun merembet pada persepsi terhadap lembaga pendidikan calon guru. Dianggap bahwa pembekalan calon guru sama dengan pembekalan calon sarjana yang lain dengan hanya ditambah beberapa mata kuliah profesi. Karangannya ditutup dengan pernyataan,

“Agar para guru betul-betul bisa siap ...mereka perlu dipersiapkan secara khusus, jauh sebelumnya ini antara lain menuntut adanya orientasi pemikiran tentang profesi keguruan yang kuat, yang hanya bisa dibangun dengan proses pembentukan yang cukup lama. Ini semua hanya bisa dicapai apabila lembaga yang mempersiapkan para calon guru tersebut, yaitu LPTK, bersifat mandiri, terpisah dari lembaga lain (non-LPTK)”

Bunga rampai ini memotret pendidikan (di Indonesia) dari berbagai dimensi, dan pemotretnya adalah seniman-seniman yang profesional. Pembaca dipersilakan menikmati hasil jepretan-jepretan mereka.

Penyunting

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ix
Pandangan Alfred N. Whitehead tentang Pendidikan ... <i>J. Sudarminta, S.J.</i>	1
Pendidikan yang Bervisi Sosial: Kajian Kritis atas Pemikiran John Dewey	19
<i>C.B. Mulyatno, Pr.</i>	
Masalah Kebebasan: Inspirasi dari Teilhard untuk Pendidikan	39
<i>Tom Jacobs, S.J.</i>	
Pendidikan Yesuit untuk Zaman Sekarang	57
<i>Sudiarja, S.J.</i>	
Sumbangan Agama dalam Proses Reformasi di Indonesia: Mencari Kerangka Pemahaman Teoretis dalam Perspektif Kristiani	75
<i>C. Putranta, S.J.</i>	
Pendidikan Moral di Perguruan Tinggi	91
<i>Al. Purwo Hadiwardoyo, M.S.F.</i>	
Filosofi Pendidikan Budi Pekerti	107
<i>Paul Suparno, S.J.</i>	

Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pendidikan Hak Asasi Manusia	123
<i>Paul Suparno, S.J.</i>	
Desentralisasi dan Penerapan Manajemen Kualitas Total dalam Pendidikan	141
<i>Frietz R. Tambunan, Pr.</i>	
Orientasi Pasar di Sektor Pendidikan: Sebuah Kajian Teoretis	161
<i>Dwi Suhartanto</i>	
Sistem Pendidikan Indonesia Saat Ini dalam Perspektif Psikologis	177
<i>A. Supratiknya</i>	
Beberapa Implikasi Perkembangan IPTEK Dewasa Ini bagi Pendidikan di Indonesia	193
<i>J. Sudarminta, S.J.</i>	
Tantangan-tantangan terhadap Profesi Keguruan dan Implikasinya bagi Pendidikan Calon Guru	207
<i>St. Suwarsono</i>	
Biodata Penulis	223

SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA SAAT INI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGIS

A. Supratiknya

1. PENDAHULUAN

BERBICARA TENTANG sistem pendidikan Indonesia saat ini, kita perlu bertolak dari dokumen resmi yang mengaturnya yang, kendati mulai digugat relevansinya (Mutrofin, 2000) namun masih berlaku hingga kini, yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹

Di sana dinyatakan, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan keluarga (Pasal 10)². Jalur pendidikan sekolah sendiri mencakup beberapa jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional (Pasal 11)³; serta beberapa jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, di samping pendidikan prasekolah (Pasal 12).⁴

Maka, kalau mau konsekuen dengan judulnya, tulisan ini harus membahas keseluruhan dari semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berlaku di negara kita saat ini. Penulis membatasi pembicaraan pada pendidikan sekolah. Kendati bukan satu-satunya, namun (pendidikan)

sekolah dengan berbagai jenis dan jenjangnya telah menjadi *locus primus* tumbuh dan berkembangnya anak manusia secara utuh dalam peradaban modern ini (Christopher Gleeson, seperti dikutip oleh Sihotang, 1997).

Namun memang, setumpuk persoalan merundung dunia pendidikan sekolah kita di semua jenjang. Secara umum, pendidikan nasional kita ditengarai sedang sakit. Ia tidak mampu lagi menjalankan peran pencerdasan kehidupan bangsa dan penyadaran masyarakat. Sebaliknya, justru menjadi beban berat masyarakat khususnya lewat permainan sandiwara dengan tujuan mengeksploitasi peserta didik untuk mencari keuntungan material, seperti lewat bisnis buku pelajaran sebagaimana merebak di jenjang pendidikan dasar dan menengah (Darmaningtyas, 1997). Masih pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, juga ditengarai bahwa penguasaan materi pelajaran oleh para peserta didik rendah seperti ditunjukkan oleh rendahnya rerata Nilai EBANAS Murni (NEM) dari tahun ke tahun (Zamroni, 1997). Secara khusus, dunia pendidikan sekolah dasar (SD) dinilai semakin kehilangan pegangan dan jati diri karena semakin ingin meniru cara pendidikan pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi, antara lain dengan menuntut para siswa mencerna sendiri materi pelajaran yang serba abstrak (*Kompas*, 1995). Melengkapi citra buram sistem pendidikan sekolah kita, mutu pendidikan tinggi kita juga dinilai cukup rendah karena dibandingkan perguruan tinggi sejenis di berbagai negara di Asia, untuk kategori perguruan tinggi multidisiplin dua universitas negeri di Jawa yang selama ini dianggap paling unggul, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, ternyata masing-masing hanya menduduki peringkat ke-67 dan 70 dari sekitar seratusan universitas terkemuka di Asia; sedangkan untuk kategori pendidikan teknologi, Institut Teknologi Bandung yang dipandang paling menonjol di tingkat nasional ternyata baru menempati urutan ke-15 dan antara 35 perguruan tinggi teknologi se Asia. Di tengah berbagai persoalan itu kita pun masih harus menghadapi isu atau fenomena lain yang melanda dunia pendidikan di seluruh negara di dunia ini, yaitu gejala *degradasi pendidikan* (Zamroni, 1997). Dunia ekonomi dan industri maju sangat pesat sementara dunia pendidikan cenderung ketinggalan. Akibatnya, untuk melakukan pekerjaan atau lebih tepat menempati posisi jabatan yang

sama kini diperlukan latar belakang pendidikan yang makin tinggi. Kesimpulannya, ada banyak hal yang harus kita cermati dan upayakan penyempurnaannya secara terus-menerus dalam sistem pendidikan sekolah kita dalam rangka makin meningkatkan mutu dan relevansinya dengan tuntutan zaman.

Pada kesempatan ini penulis mereduksi persoalan hanya pada beberapa komponen pokok. Menurut hemat penulis, sistem pendidikan sekolah pada jenis dan jenjang mana pun akan mencakup tiga komponen utama, yaitu (1) tujuan, (2) pembelajaran, dan (3) evaluasinya (Dunn, 1972: 7). Penulis akan mencoba menunjukkan sejumlah persoalan kritis dalam sistem pendidikan sekolah kita pada masing-masing komponen tersebut dengan mengangkat beberapa contoh yang relevan dari dunia pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

2. TUJUAN

Maksud utama diselenggarakannya pendidikan adalah menghasilkan perubahan-perubahan yang positif di dalam diri peserta didik sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi dan warga masyarakat yang efektif. Yang menjadi persoalan adalah ciri-ciri macam apa saja yang perlu ditumbuhkan sebagai hasil perubahan dan bagaimana ciri-ciri sebagai sasaran tersebut harus dirumuskan agar memberikan bimbingan yang jelas dan benar tentang cara mencapai atau menghasilkannya? Jadi, persoalan pertama menyangkut isi atau substansi, sedangkan persoalan kedua menyangkut bagaimana substansi itu harus dirumuskan.

Tentang substansi, yaitu ciri-ciri atau kemampuan-kemampuan yang harus ditumbuhkan dalam diri peserta didik sebagai tujuan pendidikan, hal ini sebagian ditentukan oleh jenis dan jenjang pendidikan yang pada akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh tuntutan perkembangan masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan dasar secara substansial berbeda dari tujuan pendidikan menengah yang selanjutnya juga berbeda dari tujuan pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan tinggi sendiri pun tujuan pendidikan tersebut akan berlainan sesuai dengan disiplin

ilmu masing masing. Selanjutnya pada masing-masing jenjang pendidikan segi-segi tertentu dari substansi tujuan pendidikannya akan berlainan dari zaman ke zaman sesuai perkembangan ilmu-teknologi dan masyarakat. Yang terakhir merupakan inti persoalan relevansi pendidikan, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dan kenyataan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Namun, benarkah substansi tujuan pendidikan pada berbagai jenjang tersebut mesti berbeda seluruhnya? Tidak adakah ciri-ciri dan/atau kemampuan-kemampuan yang bersifat generik, berlaku untuk semua peserta didik dan berguna untuk diterapkan dalam berbagai bahkan segala situasi kehidupan setidaknya pada suatu kurun zaman?

Marilah kita simak berbagai tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentang Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4)⁵.

Tentang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masing masing dinyatakan sebagai berikut:⁶

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Pasal 13).

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi (Pasal 15).

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (Pasal 16).

Substansi atau isi dari tujuan pendidikan nasional bisa dikatakan sangat konvensional. Semua ciri dan/atau kemampuan sebagai tujuan pendidikan yang disebut di sana praktis dapat digolongkan ke dalam tiga ranah atau bidang kemampuan menurut taksonomi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada dasa warsa lima puluhan dan enam puluhan (Bloom *dkk.*, 1956; Krathwohl, Bloom dan Masia, 1964), yaitu bidang kognitif (kecerdasan, pengetahuan), afektif (nilai, sikap, budi pekerti) dan psikomotorik (kesehatan, keterampilan). Semua itu merupakan jenis-jenis kemampuan yang sangat umum dan elementer dalam arti tidak kontekstual. Hal yang sama terdapat pada substansi tujuan pendidikan dasar. Sedikit peningkatan terjadi pada tujuan pendidikan menengah. Di sana dimasukkan satu tambahan kemampuan yang cukup spesifik kendati belum jelas benar maknanya, yaitu kemampuan melakukan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Hal serupa terjadi pada tujuan pendidikan tinggi dengan dimasukkannya kemampuan akademik dan/atau profesional.

Sifat elementer nonkontekstual dan substansi tujuan-tujuan pendidikan di atas sangat berbeda dengan sejumlah visi baru tentang tujuan pendidikan yang justeru dimaksudkan untuk menghadapi tantangan baru di era globalisasi pada milenium baru ini. Sebagai contoh, Murname dan Levy (1996, seperti dikutip oleh Zamroni, 1997) mengemukakan bahwa kehidupan modern sekarang ini menuntut dikembangkannya seperangkat kemampuan atau keterampilan baru dalam diri peserta didik. Keterampilan-keterampilan baru tersebut digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) *the hard skills*, meliputi penguasaan dasar-dasar matematik, keterampilan memecahkan masalah, dan kemampuan membaca cepat; (2) *the soft skills*, meliputi kemampuan bekerja sama dalam kelompok serta kemampuan menyampaikan gagasan dengan jernih baik secara

lisan maupun tertulis; dan (3) *computer literacy*, yaitu kemampuan memahami bahasa komputer setidaknya-tidaknya yang paling sederhana. Visi lain menekankan pentingnya menumbuhkan kemampuan dalam diri peserta didik untuk meningkatkan kualitas pribadi hingga ke kelas dunia. Kemampuan ini meliputi: (1) penguasaan pengetahuan dan gagasan mutakhir yang terbaik; (2) kemampuan kerja dengan standar paling tinggi dalam berbagai pekerjaan dan berbagai tempat; dan (3) kemampuan menjalin hubungan dan akses terhadap berbagai sumber yang ada di dunia baik secara perseorangan maupun kelembagaan (Wisnubroto Hendrojuwono, seperti dikutip oleh Supratiknya, Faturochman dan Sentot Haryanto, 2000: xii). Dan, tentu saja visi baru tentang pendidikan abad ke-21 dari UNESCO yang memuat nilai-nilai sekaligus merupakan sasaran hasil yang disarankan agar dicapai lewat praksis pendidikan. Visi dasar baru tersebut mencakup lima tujuan pendidikan, yaitu (1) *learning how to think* atau belajar bagaimana berpikir, yaitu kemampuan menumbuhkan rasionalitas serta kemampuan dan keberanian untuk bersikap kritis dan mandiri, (2) *learning how to do* atau belajar hidup, yaitu keterampilan dalam keseharian hidup termasuk kemampuan memecahkan setiap masalah yang dihadapi secara pribadi, (3) *learning to be* atau belajar menjadi diri-sendiri, yaitu kemampuan untuk tumbuh berkembang sebagai pribadi mandiri dan penuh rasa harga diri, (4) *learning how to learn* atau belajar bagaimana belajar, yaitu mengembangkan sikap-sikap yang kondusif untuk belajar seumur hidup, seperti sikap kreatif, eksploratif dan imajinatif, (5) *learning how to live together* atau belajar hidup bersama orang lain dan lingkungan sekitar, yaitu pembentukan kesadaran bahwa kita hidup bersama orang lain, penanaman tanggung jawab atas kelestarian lingkungan, pengembangan sikap toleransi, cinta damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Kompas, 8 Februari 2000). Tujuan tujuan pendidikan menurut visi baru ini cukup spesifik dalam arti menunjuk pada gugus kompetensi konkret tertentu, namun sekaligus kompleks dalam arti merupakan kombinasi dari berbagai kemampuan (kapabilitas) elementer seperti misalnya diidentifikasi oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan di atas.

Berbagai kompetensi yang merupakan isi atau substansi tujuan pendidikan menurut visi baru ini juga merupakan kemampuan-kemampuan generik yang perlu dikuasai oleh seluruh peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan menurut taraf perkembangan masing-masing.

Bagaimana tujuan-tujuan pendidikan tersebut dirumuskan? Perlu dikemukakan bahwa menyangkut tujuan pendidikan, sesungguhnya cara merumuskannya sering tidak dapat dipisahkan dari substansinya sendiri. Menurut Robert M. Gagne dan Leslie J. Briggs (1979: 46), tujuan pendidikan semestinya merupakan aktivitas manusia yang menopang berfungsinya masyarakat, termasuk berfungsinya si individu manusia di tengah masyarakat, dan yang dapat diperoleh lewat pembelajaran. Maka tujuan pendidikan tersebut lazimnya dirumuskan dalam pernyataan yang melukiskan aneka jenis aktivitas atau kinerja (*performance*) manusia yang cukup spesifik.

Rumusan berbagai tujuan pendidikan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tersebut cenderung sangat umum dan belum seluruhnya menunjuk pada aktivitas, kinerja atau kompetensi tertentu.⁷ Mungkin ada yang ingin membela dengan mengajukan argumentasi bahwa rumusan berbagai tujuan pendidikan dalam UU tersebut memang masih harus bersifat umum makro sesuai posisinya dalam hirarki tujuan pendidikan, yaitu sebagai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan institusional. Menurut hemat penulis, jika kedua tujuan pendidikan tersebut sudah cukup tajam dan menunjuk pada sejumlah kompetensi tertentu yang cukup spesifik pula seperti tercantum dalam visi baru pendidikan abad ke-21 versi UNESCO di atas, maka akan sangat membantu para administrator pendidikan dan guru di lapangan dalam memilih dan mengembangkan aneka sasaran dan strategi pembelajaran, sehingga arah dan praksis pendidikan pun menjadi jelas dan tajam. Hanya dengan arah yang jelas dalam arti menunjuk pada pemerolehan berbagai kompetensi yang spesifik dan terkait dengan tuntutan kehidupan sehari-hari pula, kiranya peningkatan mutu pendidikan sekolah kita di berbagai jenjang akan lebih mudah diupayakan.

3. PEMBELAJARAN

Pembelajaran meliputi dua subkomponen penting, yaitu pemilihan isi dan metode pembelajarannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Isi pembelajaran berkaitan dengan kurikulum. Di sini kurikulum diartikan secara sempit, yaitu rencana menyeluruh tentang isi atau materi pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik (Connelly dan Lantz, 1991: 15). Salah satu isu penting tentang kurikulum yang perlu dicermati dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah adalah tentang struktur atau penyusunannya.

Struktur kurikulum menunjuk pada pendekatan yang dipakai dalam menyusun kurikulum. Setidak-tidaknya ada dua pendekatan dalam menyusun kurikulum, yaitu berbasis isi dan berbasis kompetensi. Pada pendekatan yang berbasis isi, kurikulum disusun berdasarkan penilaian tentang bidang-bidang isi atau materi yang harus dimasukkan ke dalamnya. Hasilnya berupa daftar nama bidang studi atau mata kuliah beserta bobotnya yang dinyatakan dalam jumlah jam pertemuan per minggu dalam satu catur wulan atau semester. Pada pendekatan berbasis kompetensi, kurikulum disusun berdasarkan penilaian tentang berbagai macam kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil pembelajaran.

Kelemahan pokok dari kurikulum berbasis isi yang mengandalkan daftar nama bidang studi/mata kuliah (*course designation*) adalah tidak tersedianya patokan tentang makna, cakupan dan ukuran keberhasilan dan masing-masing bidang studi/mata kuliah. Kekurangan ini perlu diatasi dengan perumusan berbagai sasaran pembelajaran yang lebih spesifik untuk masing-masing bidang studi/mata kuliah (Gagne dan Briggs, 1979: 48).

Kurikulum berbasis kompetensi atau sering juga disebut berbasis kinerja (*performance*) didasarkan pada asumsi bahwa penguasaan pengetahuan belaka tidaklah memadai. Pengetahuan harus dimanfaatkan dan dinyatakan dalam perbuatan nyata. Untuk itu kurikulum harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut (Houston, 1974: 9):

- 1) Perumusan tentang berbagai kompetensi, yakni kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan perilaku, yang harus ditunjukkan oleh peserta didik.
- 2) Penentuan kriteria yang harus digunakan untuk menilai kompetensi-kompetensi tersebut.
- 3) Penilaian terhadap kompetensi yang berhasil dicapai oleh peserta didik dengan menggunakan kinerja sebagai indikator utama.
- 4) Kemajuan peserta didik selama menjalani program ditentukan berdasarkan kompetensi yang berhasil ditunjukkannya, bukan berdasarkan waktu atau penyelesaian beban studi.
- 5) Program pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi peserta didik mencapai aneka kompetensi yang sudah ditentukan beserta evaluasinya.

Secara ringkas, keunggulan dari kurikulum berbasis kompetensi antara lain adalah bahwa ada ukuran yang jelas untuk memilih isi dan cakupan berbagai bidang studi/mata kuliah, yakni sepanjang menunjang pencapaian kompetensi tertentu, dan mematok secara tegas ukuran minimum untuk kinerja yang efektif.

Kalau kita cermati, ternyata kurikulum pendidikan sekolah kita mulai dari jenjang pendidikan dasar dan lebih-lebih pada jenjang pendidikan tinggi cenderung berbasis isi, tidak berbasis kompetensi.⁸ Hal ini juga tampak jelas dalam Pasal 39 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang isi kurikulum setiap jenis; jalur dan jenjang pendidikan (Ayat 2) serta isi kurikulum pendidikan dasar (Ayat 3). Dalam kurikulum semacam itu, indikator keberhasilan peserta didik adalah pengetahuannya tentang materi berbagai bidang studi/mata kuliah yang dinyatakan dengan nilai angka maupun nilai huruf, bukan kemampuannya melakukan berbagai aktivitas dalam rangka menjalankan peran tertentu secara efisien dan efektif.

Subkomponen kedua berkaitan dengan proses belajar yang berlangsung dalam diri peserta didik melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Menurut teori Gal'perin (Utomo dan Ruijter, 1994: 36), proses belajar berlangsung dalam empat tahap. Pertama, peserta didik *ber-orientasi* terhadap konsep-konsep pokok

dalam tugas yang dipelajari. Kedua, peserta didik ber-*latih* melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Ketiga, peserta didik mendapatkan *kesadaran tentang hasil belajar* yang telah dicapainya. Keempat, peserta didik *melanjutkan proses belajar* dengan cara orientasi, latihan dan umpan balik baik dalam rangka mengulangi tugas lama yang belum berhasil dikuasainya maupun melanjutkan mempelajari tugas-tugas baru. Menurut teori ini, sasaran belajar hanya akan tercapai bila peserta didik berorientasi, berlatih dan melanjutkan belajar berdasarkan umpan balik. Maka untuk memfasilitasi proses belajar dalam diri peserta didik, pendidik perlu melaksanakan empat fungsi pembelajaran sejajar dan seirama dengan keempat tahap proses belajar, yaitu (1) memberikan orientasi tentang materi yang dipelajari, (2) memberikan kesempatan untuk berlatih mengaplikasikan materi yang dipelajari, (3) memberikan umpan balik tentang hasil belajar yang telah dicapai dalam proses belajar yang dilakukan, dan (4) memberikan kesempatan untuk melanjutkan latihan (Utomo dan Ruijter, 1994: 37). Dari keempat fungsi pembelajaran tersebut, yang menjadi peran paling khas pendidik adalah memberikan umpan balik tentang hasil belajar. Ketiga fungsi lainnya, termasuk orientasi, dapat dikerjakan sendiri oleh peserta didik, tentu dengan bimbingan dan supervisi pendidik. Dengan cara itu peserta didik menjadi terlibat aktif dalam kegiatan belajarnya dan lewat pengalaman melakukan kegiatan yang kongkrit-nyata pula. Cara belajar semacam ini tentu akan sangat mendorong tumbuhnya penguasaan isi pembelajaran sampai ke tingkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan perbuatan), bukan hanya pengetahuan belaka.

Kalau kita simak proses pembelajaran yang berlangsung di semua jenjang pendidikan sekolah kita, yang menonjol adalah pelaksanaan fungsi orientasi yang dilakukan oleh pendidik. Guru atau dosen menghabiskan sebagian besar waktu pembelajaran untuk menjelaskan, siswa dan mahasiswa diam mendengarkan dan/atau mencatat. Kalaupun diberikan tugas-tugas dalam rangka latihan, kesempatan itu lebih sering terperosok ke arah kepentingan pendidik dalam menentukan nilai ketimbang dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan umpan balik tentang pencapaian hasil belajar peserta didik. Maka, mengambil contoh

dari suasana pembelajaran bahasa di sejumlah SLTP Nurhadi (dalam *Kompas*, 12 Februari 2000) menyimpulkan bahwa guru lebih banyak *berbicara tentang* bahasa dibanding melatih siswa menggunakan bahasa. Karenanya tidaklah mengherankan bahwa kita memiliki lulusan dengan nilai bagus-bagus (dan jelek-jelek) namun tidak atau kurang kompeten sebab prestasinya memang sebatas pengetahuan. Dan memang tidak ada satu ayat pun dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyinggung soal proses pembelajaran ini.

4. EVALUASI

Dalam sistem pendidikan sekolah, evaluasi atau asesmen dilakukan untuk mengetahui apakah setiap peserta didik sudah berhasil mencapai aneka kemampuan yang dirumuskan sebagai tujuan pendidikan/pembelajaran. Hasil evaluasi ini dapat dipakai untuk berbagai keperluan, khususnya: (1) evaluasi diagnostik, untuk membuat diagnosis atau mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan peserta didik menyangkut tugas yang sedang dipelajari; (2) evaluasi formatif, dilakukan selama proses pembelajaran masih berlangsung dan dimaksudkan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang apa yang telah berhasil dicapai atau dilakukannya berkaitan dengan tugas yang dipelajarinya hingga kini, khususnya sejauh mana mereka telah membuat kemajuan-kemajuan ke arah tujuan yang diinginkan; (3) evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir proses pembelajaran dalam rangka mengukur sejauh mana peserta didik telah mengalami proses belajar sekaligus untuk penentuan nilai akhir.

Isu lain tentang evaluasi menyangkut standar yang dipakai sebagai acuan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan/kegagalan belajar peserta didik. Pada evaluasi beracuan kriteria, kemajuan dan keberhasilan peserta didik diukur berdasarkan tuntutan minimum penguasaan isi dan/atau kinerja efektif yang ditentukan secara apriori. Pada evaluasi beracuan norma, kemajuan dan keberhasilan belajar diukur berdasarkan rerata kinerja kelompok yang diketahui secara aposteriori. Penggunaan acuan ini seringkali dikaitkan dengan fungsi atau tujuan

evaluasi serta struktur kurikulum seperti sudah disinggung di muka. Evaluasi sumatif dengan tujuan pokok menentukan nilai akhir lazim disertai dengan penggunaan acuan norma. Sebaliknya, evaluasi formatif dan diagnostik dengan tujuan pokok memberikan umpan balik kepada peserta didik maupun pendidik lazim disertai dengan penggunaan acuan kriteria. Lebih-lebih dalam kurikulum berbasis kompetensi, acuan kriteria mutlak digunakan baik dalam evaluasi formatif-diagnostik maupun dalam evaluasi sumatif.

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional kita tidak mengatur soal evaluasi atau penilaian ini secara rinci sampai ke aneka fungsi maupun acuannya.⁹ Menyimak penyelenggaraan evaluasi di berbagai jenjang pendidikan sekolah kita penulis juga sangat meragukan bahwa evaluasi diagnostik-formatif dilaksanakan secara sistematis dan teratur. Bahkan ulangan-ujian di tengah catur-wulan atau semester pun, jika benar diselenggarakan, tujuannya lebih untuk keperluan penentuan nilai akhir daripada untuk pemberian umpan balik atau mendiagnosis berbagai kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Ditambah dengan ketidak-akraban dengan konsep evaluasi menurut kurikulum yang berbasis kompetensi, maka penggunaan norma atau rata-rata kelas sebagai acuan dalam mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan peserta didik menjadi sesuatu yang sangat lazim. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa kualitas lulusan kita sangat bervariasi dari daerah ke daerah, dari perguruan ke perguruan, di samping, sekali lagi, kita mempunyai banyak lulusan dengan nilai bagus-bagus namun dengan kemampuan tidak memadai, antara lain, karena nilai tinggi tersebut diperoleh dari antara kelompok yang berkemampuan rendah.

5. PENUTUP

Maka, kendati masih sangat umum dan reduksionistik, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah kita memasuki milenium baru ini, kiranya dapat diusulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Tujuan pendidikan pada berbagai tingkatan hirarkinya, khususnya tujuan pendidikan nasional, institusional dan kurikular, perlu dirumuskan dalam bentuk kompetensi-kompetensi yang bersifat generik namun cukup spesifik dan sesuai dengan tuntutan perkembangan IPTEK dan masyarakat. Visi baru tentang pendidikan seperti dikemukakan oleh UNESCO maupun sumber lain dapat dipakai sebagai inspirasi.
- 2) Kurikulum berbagai jenjang pendidikan dan program studi perlu disusun dengan berbasis kompetensi. Setiap jenjang pendidikan dan program studi perlu merumuskan berbagai kompetensi spesifik sebagai tujuan pendidikan kurikulumnya. Berbagai bidang studi dan mata kuliah dipilih dan diorganisasikan dalam rangka mencapai kompetensi-kompetensi tersebut.
- 3) Meminjam teori pembelajaran Gal'perin, proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan sekolah perlu memberi tekanan pada tahap latihan dan umpan balik lewat penerapan metode-metode pembelajaran yang bersifat eksperiensial dan menumbuhkan kompetensi-kompetensi nyata.
- 4) Evaluasi hasil pembelajaran perlu didasarkan pada ukuran minimum kinerja yang tegas dan jelas serta perlu memberi tekanan pada fungsi diagnosis, pemberian umpan balik dan membangkitkan minat/motivasi peserta didik untuk meningkatkan usaha belajarnya.

Untuk itu semua, salah satu langkah penting yang perlu segera ditempuh kiranya adalah melakukan revisi atas Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional beserta aneka peraturan lain menyangkut penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang yang terkait, antara lain dengan memperhatikan hal-hal di atas. Agaknya kita perlu belajar untuk menjadi lebih *behavioristik*, menggunakan perbuatan nyata sebagai ukuran keberhasilan belajar maupun kebijaksanaan seumumnya. Dan, mengakhiri tulisan ini, berikut kami sajikan kata-kata arif dari seorang pendidik psikolog Jean Piaget (seperti dikutip oleh Ginsburg dan Opper, 1969: 231-232):

“The principal goal of education is to create men who are capable of doing new things, not simply of repeating what other generations have done — men who are creative, inventive, and discoverers. The second goal of education is to form minds which can be critical, can verify, and not accept everything they are offered. The great danger today is of slogans, collective opinions, ready-made trends of thoughts. We have to be able to resist individually, to criticize, to distinguish between what is proven and what is not. So we need pupils who are active, who learn early to find out by themselves, partly by their own spontaneous activity and partly through materials we set up for them....”

Untuk itu, sebuah sistem pendidikan yang berbasis kompetensi apakah itu disebut *competency based learning*, *self-regulated learning* atau *problem based learning* dan sejenisnya kiranya merupakan jawaban yang tepat.

CATATAN

Versi pertama tulisan ini pernah disajikan dalam Seminar Nasional Universitas Katolik Soegijapranata tentang Pendidikan Indonesia Menghadapi Abad 21, tanggal 29 Februari 2000 di Semarang,

-
- ¹ Sudah digantikan dengan Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003.
 - ² Tentang jalur pendidikan, UU No. 20/2003 mengakui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Ps 13)
 - ³ Tentang jenis pendidikan, UU No. 20/2003 mengakui tujuh jenis, yaitu pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (Ps. 15)
 - ⁴ Tentang jenjang pendidikan tidak ada perubahan dalam peraturan perundangan yang baru. Namun tentang pendidikan prasekolah, UU No. 20/2003 mengaturnya secara lebih eksplisit di bawah judul “Pendidikan anak usia dini” (Ps. 28)
 - ⁵ Tidak ada perubahan esensial menyangkut rumusan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20/2003 (Ps. 3)

- 6 UU No. 20/2003 bahkan tidak mencantumkan rumusan misi pendidikan dasar (Ps. 17), pendidikan menengah (Ps. 18), dan pendidikan tinggi (Ps. 19).
- 7 Bandingkan dengan catatan nomor 5 dan 6 di atas.
- 8 Bisa dikatakan tidak ada perubahan esensial menyangkut rumusan tentang kurikulum pendidikan sekolah dalam UU No. 20/2003 (Ps. 36 dan 38). Ketentuan tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah hanya berisi daftar mata pelajaran (Ps. 37). Jadi, masih tetap berbasis isi.
- 9 Tentang evaluasi, dalam UU No. 20/2003 terdapat ketentuan yang lebih rinci menyangkut sasaran (Ps. 57) dan pelakunya (Ps. 58 dan 59), namun tetap tidak disinggung menyangkut fungsi dan acuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloom, B.S. (ed.). 1956. "Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals". *Handbook I. Cognitive domain*. New York: David McKay Company.
- Connelly, F.M. dan O.C. Lantz. 1991. "Definitions of Curriculum. An Introduction". Dalam A. Lewi (ed.). *The International Encyclopedia of Curriculum*,. Oxford: Pergamon Press, hal. 15-18
- Darmaningtyas. 1997. "Tidak Ada Lagi Murid SD". *Kompas*, 9 September.
- Dunn, S.S.. 1972. *Testing in The Primary School* (Second edition). Burwood, VI: Acer.
- Gagne, R.M. dan L.J. Briggs. 1979. *Principles of Instructional Design*. New York: Holt, Rinehart dan Winston.
- Ginsburg, H. dan S. Opper. 1969. *Piaget's Theory of Intellectual Development*. An introduction, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- "Guru Bahasa Terjebak pada Pengajaran Tata Bahasa ". *Kompas*, 12 Februari 2000.
- Houston, W.R., 1974. "Competency Based Education". Dalam W.R. Houston (ed.). *Exploring Competency Based Education*. Berkeley, CA: McCutchan, hal. 3-15

- Krathwohl, D.R., B.S. Bloom, dan B.B. Masia. 1964. *Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domain*. New York: David McKay Company.
- Mutrofin. 2000. "Revisi UU Sisdiknas". *Bernas*, 16 Februari.
- "Pendidikan untuk Humanisasi dan Hominisasi". *Kompas*, 8 Februari 2000.
- "PEQIP. Angin Segar untuk Sekolah Dasar". *Kompas*, 24 Maret 2000.
- Sihotang, K. 1997. "Pendidikan Demokratis dan Demokrasi". *Kompas*, 17 Oktober.
- Supratiknya, Faturochman dan Sentot Haryanto. 2000. "Pendahuluan". Dalam Supratiknya, Faturochman dan Sentot Haryanto (*Peny.*). *Tantangan Psikologi Menghadapi Milenium Baru. Refleksi atas Peran dan Pendidikan Psikologi di Indonesia* (hal. xi-xvi). Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas Psikologi UGM.
- Tjipto Utomo dan K. Ruijter. 1994. *Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- "Yang Diperlukan Bukan Falsafah Pendidikan, tetapi Implementasinya". *Kompas*, 12 Februari 2000.
- Zamroni. 1997. "Reformasi Pendidikan Menuju Keutuhan Intelektual, Sosial dan Emosional". *Kompas*, 21 Oktober.

(*Widya Dharma*, Vol. 10, No. 2, April 2000)